

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

## Kembali Uji Coba Makan Bergizi untuk Murid SD

INDOPOSCO - Pemerintah Provinsi Jakarta kembali melakukan uji coba makan bergizi untuk murid Sekolah Dasar (SD) dan kali ini dilakukan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gunung 01 Pagi, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

"Hari ini ada di sekolah SDN Gunung 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebanyak 650 paket untuk anak-anak sarapan pagi," kata Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Dalam kegiatan uji coba makan bergizi gratis ini menu yang disajikan, yakni nasi goreng, telur, ayam, jeruk, dan mentimun yang sudah melalui uji oleh Dinas Kesehatan Jakarta untuk menjamin kesehatan anak-anak sekolah.

Uji kandungan kalori itu dilakukan pada setiap kotak makanan yang dibagikan. "Hari ini seperti anak-anak makannya lahap, cocok dengan selera anak-anak didik kita dan ini yang perlu kita perhatikan selain kalori," ujarnya, dikutip dari Antara.

Heru menargetkan akan mengunjungi sekolah-sekolah yang

ada di DKI Jakarta untuk melakukan kegiatan uji coba makanan bergizi gratis. "Berikutnya nanti yang belum Jakarta Barat, terus terakhir nanti Kepulauan Seribu," katanya.

Dalam kegiatan uji coba makanan bergizi ini, pihaknya menggandeng PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Nilai atau kisaran harga makanan bergizi gratis yang diberikan kepada siswa SD di Jakarta Rp20 ribu hingga Rp25 ribu per porsi.

Program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting) dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara ini.

Pencegahan stunting tetap menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia, yang berhasil menurunkan prevalensinya dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 21,5 persen pada 2023.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun, atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB), untuk program tersebut. (arm)